



PEMERINTAH
KOTA LANGSA



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA LANGSA**

LKjIP

TAHUN 2024

DISUSUN OLEH :
BAGIAN ORGANISASI
T.A 2025



PEMERINTAH KOTA LANGSA INSPEKTORAT

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Lr. Peutua Bayeun No. 1 Telp. 0641-23578 Fax. 0641-22901
email. inspektorat@langsakota.go.id Langsa 24415

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Langsa.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Langsa, 07 Maret 2025



SAHREY, SE, Ak

Pemula Tk I / NIP. 19670126 200701 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridhaNya, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024 telah selesai dalam penyusunan. Sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Kota Langsa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menguraikan keberhasilan pada Pemerintah Kota Langsa dan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud Pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Langsa. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan yang menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).


Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja guna mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam

pengelolaan sumber daya dan kebijakan daerah serta strategi dalam pencapaian kinerja melalui pengukuran dan analisis terhadap Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang secara normatif telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024 telah banyak membuahkan hasil pembangunan, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Berkenaan dengan itu laporan ini dapat menjadi sasaran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi produktif, efektif dan Efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan. Laporan kinerja ini juga sudah dapat diakses oleh publik melalui situs resmi Pemerintah Kota Langsa www.langsakota.go.id

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, khususnya Kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas bimbingan dan pembinaanya selama ini, semoga Laporan ini bermanfaat dan sesuai dengan harapan kita semua.

Langsa, 05 Maret 2025

 Pj. WALIKOTA LANGSA

SYARIDIN, S.Pd, M.Pd

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	BAB I -1
A. Gambaran Umum.....	BAB I - 1
B. Kondisi Daerah	BAB I - 8
C. Kelembagaan Dan sumber Daya Aparatur	BAB I - 9
D. Isu Strategis (<i>Strategic Issued</i>)	BAB I - 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	BAB II -25
A. RPD Kota Langsa 2023-2026.....	BAB II - 25
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	BAB II - 28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	BAB III -31
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Langsa	BAB III - 33
B. Realisasi Anggaran	BAB III - 62
BAB IV PENUTUP	BAB IV -64

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tuntutan pelayanan publik ke arah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel merupakan isu aktual yang perlu mendapat respon dari Pemerintah Kota Langsa.

Tuntutan ini bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dipicu oleh meningkatnya pendidikan masyarakat, serta semakin mandirinya media massa yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menembus sekat-sekat kekuasaan.

Dalam rangka meningkatkan akses informasi, cakupan dan kualitas pelayanan publik, masyarakat menuntut kebijakan pemerintah yang melayani dan tepat sasaran, dengan berakhirnya masa jabatan Walikota pada tahun 2022 diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tahun 2023-2026. Selanjutnya pada setiap awal tahun anggaran, pemerintah juga dituntut untuk menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja (PK) untuk Perangkat Daerah yang pada setiap tahun diharuskan mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kerjanya. Untuk merespon tuntutan masyarakat dan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Langsa diwajibkan menyiapkan semua dokumen yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban Akuntabilitas kinerja mulai dari visi sampai dengan capaian target kinerja kegiatan.

Visi Pemerintah Kota Langsa ***“Terwujudnya Kota Langsa sebagai Daerah Perdagangan dan Industri, disertai Masyarakat yang Maju dan Islami”***, sehingga diharapkan pada tahun 2024 Kota Langsa akan tumbuh menjadi Kota Perdagangan dengan masyarakat yang maju dan islami, sebagaimana dijabarkan dalam 4 (empat) misi yang telah ditetapkan pada RPD Kota Langsa tahun 2023-2026.

Penjabaran/implementasi Misi tersebut di atas diarahkan pada pencapaian tujuan RPD Pemerintah Kota Langsa. Pemerintah Kota Langsa telah menetapkan 8 (delapan)

tujuan yang akan diwujudkan atau dihasilkan sampai tahun 2026 yang secara bertahap diwujudkan melalui prioritas pembangunan.

Sesuai dengan data Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) maka pencapaian sasaran kegiatan Pemerintah Kota Langsa tahun 2024 menetapkan sebanyak 11 (sebelas) indikator yang dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024.

Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024 ini merupakan upaya maksimal untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kinerja dengan harapan dapat dipergunakan sebagai media informasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Langsa dan umpan balik peningkatan kinerja di masa mendatang menuju pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Kota Langsa merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur, yang sebelumnya merupakan ibu kota dari kabupaten tersebut kemudian berubah status menjadi Kota Administratif Langsa (Kotif) dan akhirnya menjadi Kota Langsa. Berdirinya Kota Langsa diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa yang mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa.

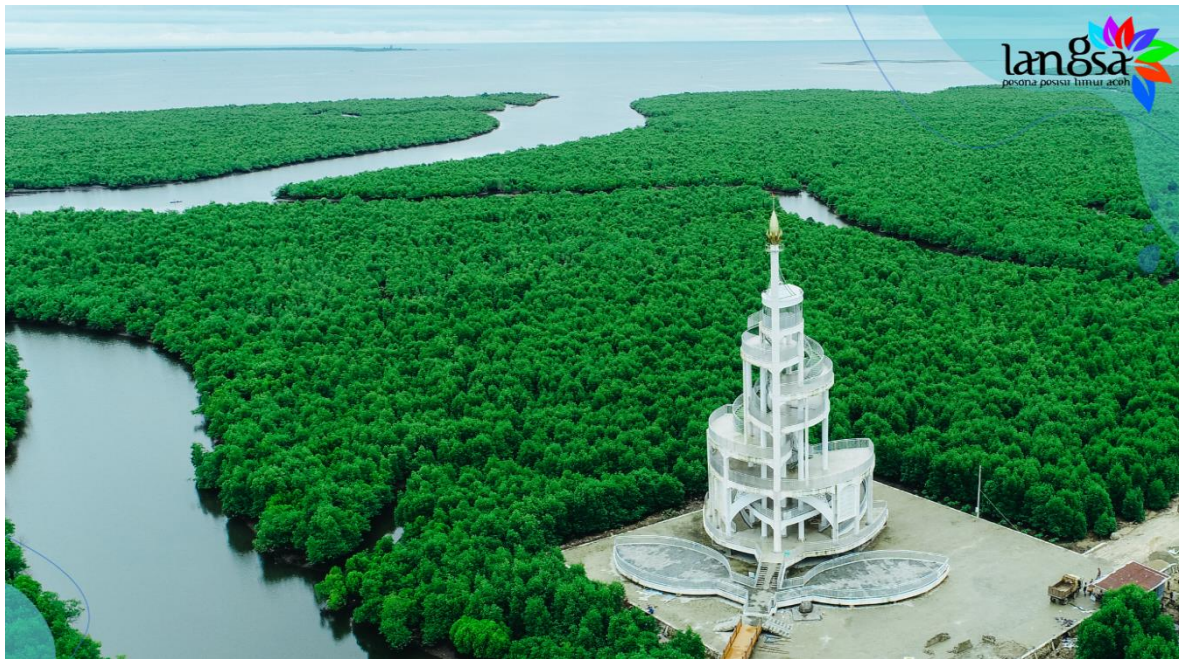
Kota Langsa merupakan kota jasa yang sedang membangun sektor pariwisata untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasca peningkatan status dari Kota Administratif (Kotif) tahun 2001 lalu bersamaan dengan pemekaran Kabupaten Aceh Timur, kota yang memiliki 5 kecamatan dengan 66 gampong ini, juga terus berbenah dan membangun berbagai sektor pendukung pemerintahan.

Ada beberapa potensi unggulan Kota Langsa, salah satunya yaitu kawasan wisata hutan mangrove yang terletak di kilometer 10 Gampong Kuala Langsa, kini telah menjadi lokasi baru sebagai tempat favorit bagi masyarakat untuk menikmati wisata alam mangrove bersama keluarga. Kawasan wisata hutan mangrove juga telah meraih juara I penghargaan nasional yaitu Anugerah Pesona Indonesia (API) tahun 2022 sebagai Brand Pariwisata terbaik dan juara favorit dengan kategori pariwisata terfavorit.

Selain hutan mangrove juga ada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Hutan Kota Langsa yang memiliki luas sekitar 49 hektare, taman ini merupakan tempat wisata yang dikembangkan dengan konsep wisata LAMBADA (wisata alam, buatan dan budaya).

Fasilitas Taman Hutan Kota Langsa berisi beraneka ragam flora dan fauna, berbagai permainan dan kuliner.

Taman Krueng Langsa juga menjadi sektor unggulan pariwisata Kota Langsa untuk menarik wisatawan luar untuk berkunjung ke Kota Langsa. Taman Krueng Langsa yang terletak di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota awalnya merupakan kawasan padat penduduk. Kini dijadikan oleh Pemerintah Kota Langsa sebagai objek wisata baru bagi masyarakat. Dimana, warga yang sebelumnya mendiami bantaran Krueng Langsa itu dipindahkan ke kawasan perumahan relokasi di Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro.



Tower Ekowisata Mangrove Forest Park Kota Langsa terletak di Gampong Kuala Langsa dengan tinggi mencapai 45 meter dan terdiri dari 8 lantai merupakan wahana favorit yang dapat dijumpai di destinasi wisata ekowisata mangrove forest park kota langsa. Dari tower Anda dapat menikmati pemandangan mangrove, hamparan lautan dan pemandangan indah lainnya.



Ekowisata Mangrove Forest Park Kota Langsa terletak di Gampong Kuala Langsa dengan luas sebesar 123 Ha memiliki jumlah spesies kurang lebih 38 jenis mangrove. Fasilitas yang dimiliki diantaranya jembatan kayu, jembatan bergaya eropa, tower pemantau mangrove dengan tinggi 45 meter, sarana ibadah, jalan setapak kayu dan beton, cafetaria dan wahana lainnya.

Ekowisata Mangrove Forest Park Kota Langsa membantu Kota Langsa untuk meningkatkan PAD pemerintah daerah dan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke destinasi wisata.



Danau tasik biru merupakan wahana atraksi terbaru yang dapat dijumpai di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Hutan Kota Langsa. Danau buatan yang menjanjikan kesegaran mata bagi pengunjung ditambah fasilitas boat yang mengitarinya. Dengan adanya danau tasik biru menambah daya tarik wisatawan luar untuk berkunjung ke Kota Langsa sehingga meningkatkan PAD Kota Langsa melalui kemajuan sektor ekonomi dan pariwisata.



Museum Kota Langsa berada di pusat Kota Langsa berada di pusat Kota Langsa, terdapat naskah kuno, numismatika (mata uang kuno), kramilogika (keramik kuno), etnografika (benda-benda rumah tangga kuno), seni rupa (ukiran,tenun), alat alat perang (pusaka), arkeologika (benda hasil-hasil gajian), heralbika (stempel kerajaan / uleebalang kuno), koleksi istimewa adalah bon kontan yang merupakan alat tukar pengganti mata uang pada masa Belanda dan Jepang sebagai mata uang sementara Indonesia sebelum ada mata uang rupiah.



Ruang Terbuka Hujau (RTH) Kota Langsa adalah wisata buatan yang memiliki beberapa wahana yaitu rumah adat aceu menjadi bintang edukasi budaya aceh, kebun binatang mini, wahan ATV, danau buatan, sepeda gantung dan flying fox, wahana berkuda, paintball sport, danau tasik biru dan wahana lainnya.



Kolam renang Vitra Tirta Raya berada di gampong Pb. Teungoh, merupakan destinasi wisata wahana bermain air bagi seluruh umur dan memiliki kolam renang standar nasional khusus atlet. Kolam renang ini merupakan salah satu kolam renang yang memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitar sehingga wisatawan luar lebih memilih untuk berkunjung ke Kolam Renang Vitra Tirta Raya sehingga menambah PAD Kota Langsa dalam sektor Pariwisata dan Ekonomi.



Taman Krueng Langsa yang baru selesai dibangun di tahun 2022 merupakan taman kota ruang publik, memiliki keindahan alam dan Sungai krueng Langsa menjadi tempat yang cocok bagi taman bermain anak. Taman krueng Langsa tidak berkontribusi secara langsung terhadap PAD Kota Langsa, tetapi taman ini menjadi fasilitas publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari pelayanan pemerintah dalam membangun kota langsa. Dengan adanya Taman Krueng Langsa mengundang wisatawan luar untuk berkunjung ke Kota Langsa sehingga dapat meningkatkan PAD Kota Langsa secara tidak langsung, selain itu juga membantu sektor Ekonomi khususnya UMKM yang dapat berjualan disekitar taman.

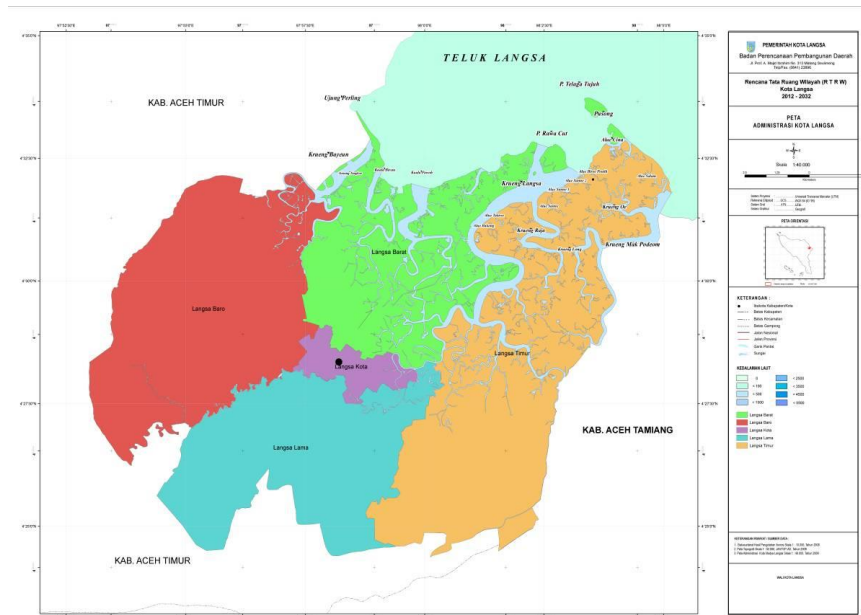
Selain potensi wisata, terdapat beberapa keunggulan lain yang telah dicapai oleh Kota Langsa, diantaranya Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebanyak 11 kali berturut-turut sejak tahun 2013-2023 atas Keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Dalam hal Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (OMBUDSMAN) Kota Langsa Tahun 2024 mendapatkan predikat nilai 87.51 (Zona Hijau) dan kualitas tinggi. Dalam bidang Pendidikan Kota Langsa mendapatkan penghargaan Utama Pengelolaan Pendidikan Tahun 2024 dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan KEMENDIKBUDRISTEK RI. Kota Langsa telah meresmikan Mall Pelayanan Publik di Tahun 2024. Dalam bidang Kesehatan Kota Langsa meraih penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat sebagai Kabupaten/Kota STBM Pratama dari Menteri Kesehatan RI Tahun 2024. Pemerintah Kota Langsa menerima Penghargaan Anugerah Lingkungan Hidup (ADIPURA) tahun 2024 dari Pemerintah Aceh.

B. KONDISI DAERAH

Kota Langsa sebagai salah satu Kota di Provinsi Aceh yang terletak antara 04° 24' 35,68' - 04° 33' 47,03' Lintang Utara (LU) dan 97° 53' 14,59' - 98° 04' 42,16' Bujur Timur (BT). Batas wilayah Kota Langsa sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administratif Kota Langsa

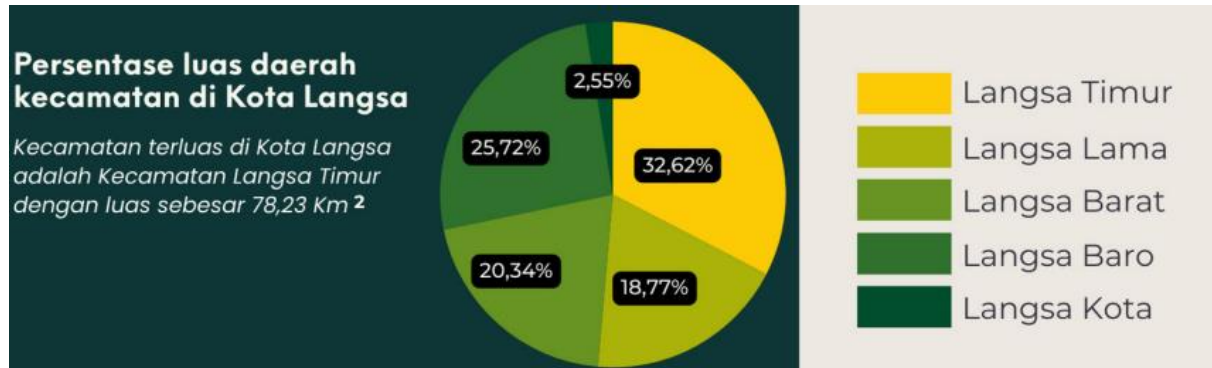


Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012 - 2032

Luas wilayah Kota Langsa mencapai 239,83 Km², atau setara 0,46 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh (57.365,57 km²). Sesuai Qanun Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pembentukan Gampong – Gampong Dalam Kota Langsa, Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Langsa Timur terdiri dari 16 Gampong
2. Kecamatan Langsa Lama terdiri dari 15 Gampong
3. Kecamatan Langsa Barat terdiri dari 13 Gampong
4. Kecamatan Langsa Baro terdiri dari 12 Gampong
5. Kecamatan Langsa Kota terdiri dari 10 Gampong

Gambar 1.2
Luas Wilayah Kota Langsa
Menurut Kecamatan



Sumber : BPS Kota Langsa Tahun 2024

C. KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA APARATUR

Pemerintah Kota Langsa sebagai salah satu Kota di Pemerintah Aceh yang memiliki kewenangan khusus sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, begitu juga halnya dengan Organisasi Perangkat Daerah memiliki perbedaan dengan provinsi, kabupaten dan kota yang lain dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh.

Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Kota Langsa telah mengalami perubahan yang signifikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan melalui diterbitkannya Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa, terdiri dari :

1. Penunjang urusan Pemerintahan meliputi :
 - a. Sekretariat Daerah Kota Langsa.
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.

- c. Inspektorat Kota Langsa.
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa.
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa.
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa.
 - b. Dinas Kesehatan Kota Langsa.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa.
 - d. Dinas Sosial Kota Langsa.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu :
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa.
 - b. Dinas Perhubungan Kota Langsa.
 - c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa.
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.
 - g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
 - h. Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kota Langsa.
 - i. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa.
 - j. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa.
 - k. Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa.
4. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa.

5. Urusan Pemerintahan Wajib lainnya yang bersifat Keistimewaan dan Kekhususan meliputi :

- a. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul hisbah Kota Langsa .
- c. Dinas Pertanahan Kota Langsa.
- d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa.
- e. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Langsa.
- f. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa.
- g. Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa.

6. Perangkat Daerah Lainnya meliputi :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa.

7. Kecamatan meliputi :

- a. Kecamatan Langsa Barat.
- b. Kecamatan Langsa Baro.
- c. Kecamatan Langsa Kota.
- d. Kecamatan Langsa Lama.
- e. Kecamatan Langsa Timur.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kota Langsa, Pemerintah Kota Langsa mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 3.964 orang dengan komposisi menurut golongan, sebagaimana tertera pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kota Langsa
Menurut Golongan

No	Nama Jabatan	Golongan Ruang	Jumlah PNS
1	Pembina Utama	IV/e	1
2	Pembina Utama Madya	IV/d	0
3	Pembina Utama Muda	IV/c	190
4	Pembina Tk. I	IV/b	349
5	Pembina	IV/a	412
Jumlah Golongan IV			951
6	Penata Tk. I	III/d	871
7	Penata	III/c	381
8	Penata Muda Tk. I	III/b	393
9	Penata Muda	III/a	729
Jumlah Golongan III			2.374
10	Pengatur Tk. I	II/d	148
11	Pengatur	II/c	413
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	20
13	Pengatur Muda	II/a	37
Jumlah Golongan II			618
14	Juru Tk. I	I/d	3
15	Juru	I/c	15
16	Juru Muda Tk. I	I/b	2
17	Juru Muda	I/a	0
Jumlah Golongan I			20
Jumlah Keseluruhan			3.964

Sumber : BKPSDM Kota Langsa Tahun 2024

Sedangkan menurut kualifikasi tingkat pendidikan masih didominasi S.1/Diploma IV sebanyak 2.438 orang pegawai sebagaimana pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah PNS
1	S.3	1
2	S.2	211
3	Dokter Spesialis	24
4	Akta IV	4
5	S.1	2.438
6	Diploma IV	83
6	Diploma I,II dan III	781
7	SPK	5
8	SMK Pertanian	11
9	SMA/Sederajat	453
10	SMP/Sederajat	23
11	SD/Sederajat	15

Sumber : BKPSDM Kota Langsa Tahun 2024

D. ISU STRATEGIS (*Strategic Issued*)

Yang menjadi isu strategis pembangunan Kota Langsa selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Syiar Islam dan Pelestarian Seni serta Adat Budaya Daerah;

Secara umum syari'at Islam meliputi aspek aqidah, muamalah dan syari'at akhlak. Pelaksanaan syari'at Islam sudah diterapkan di Kota Langsa dari awal

terbentuknya Kota Langsa pada tahun 2001. Dimana pelaksanaan syari'at Islam mulai diterapkan di Aceh dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pelaksanaan syari'at Islam di Kota Langsa belum optimal karena masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Diharapkan dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah agar terus disemarakkan dan diagungkan pelaksanaan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan dengan aqidah islamiah menurut Ahlussunnah Wal Jama'ah guna menciptakan suasana dan lingkungan yang islami

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Daerah;

Dalam mendukung upaya pemerataan pendidikan yang seimbang dengan terjaminnya kualitas pendidikan, diperlukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak seperti meningkatkan berbagai fasilitas pendukung agar proses Pendidikan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Berbagai faktor yang dapat mendukung upaya pemerataan pendidikan seperti kualitas tenaga pendidik. Tantangan bukan hanya peningkatan kualitas tetapi bagaimana bisa melakukan distribusi kualitas secara lebih merata. Hal lain yang dapat dilakukan untuk menjamin kualitas para pendidik adalah dengan mengisyaratkan tenaga pendidik memiliki kualifikasi minimal sarjana.

Dalam hal pemberdayaan perempuan, proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki diharuskan mempunyai akses dan control yang sama terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, implementasi program dan kebijakan pemerintah yang tidak diskriminatif. Mengingat nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG)

yang terus menurun setiap tahunnya, maka pemberdayaan perempuan perlu terus ditingkatkan demikian juga dengan peran politik perempuan.

Di bidang kepemudaan dan olahraga, peran generasi muda merupakan potensi dan aset pembangunan manusia yang sangat besar dan tentu saja memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Pembinaan kepemudaan dan organisasi kepemudaan perlu terus dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan potensi dan peran aktif dalam pembangunan, serta peningkatan kapasitas kepemudaan itu sendiri.

3. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Kesehatan

Terdapat berbagai macam isu Kesehatan yang berkembang antara lain terkait *stunting*. *Stunting* adalah ancaman serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Mengingat *wasting* (gizi akut), *stunting* (balita pendek) dan gizi buruk itu saling berkaitan, maka diperlukan penanganan secara kolaborasi.

Penyediaan sarana prasarana kesehatan juga merupakan isu yang harus dipenuhi agar masyarakat yang memiliki gangguan atau keluhan kesehatan dapat terlayani dengan baik. Selama ini, pelayanan kesehatan di rumah sakit belum optimal, terlebih untuk pasien rujukan, yang penanganannya masih belum memadai sehingga terjadi penumpukan pasien yang cukup banyak di rumah sakit tertentu, terutama di rumah sakit rujukan Provinsi. Kehadiran rumah sakit regional diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan peran rumah sakit dalam pelayanan kesehatan masyarakat Kota Langsa khususnya dan Aceh umumnya.

Isu kesehatan selanjutnya adalah terkait keberlangsungan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Keberlangsungan jaminan kesehatan bagi masyarakat perlu dilaksanakan agar dapat meringankan beban keuangan keluarga atau warga yang menggunakan layanan kesehatan di wilayah Aceh dan Kota Langsa khususnya dan wilayah Indonesia pada umumnya.

4. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Keberlangsungan Perdamaian;

Isu terkait konflik sosial perlu diwaspadai mengingat kondisi keamanan dan politik dalam dan luar negeri cenderung dapat berubah sewaktu-waktu dengan cepat. Potensi konflik sosial perlu terus dipantau dengan terus meningkatkan kewaspadaan daerah terhadap permasalahan yang sensitif dan urgensi yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan daerah terutama terkait dengan paham radikal dan teroris, aksi demo, unjuk rasa yang anarkis, aliran sesat, keagamaan, dan pertikaian antar kelompok masyarakat yang terus dilakukan seperti melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Isu lainnya yang berhubungan dengan keamanan adalah keberlangsungan perdamaian. Proses penguatan perdamaian masih dan akan terus dilakukan melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi seluruh masyarakat sehingga terwujudnya perdamaian secara berkelanjutan (*sustainable peace*) dan hal ini juga menjadi fokus utama dalam melaksanakan amanah UUPA. Salah satu upaya penguatan perdamaian yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pemberdayaan ekonomi terhadap mantan kombatan, tapol/napol dan korban konflik.

Selanjutnya, penanganan bencana alam maupun non alam harus dilakukan secara komprehensif mengingat dampaknya yang buruk baik bagi aktivitas sosial, kesehatan, ekonomi serta infrastruktur daerah. Kejadian bencana angin kencang dan pohon tumbang, banjir serta kebakaran merupakan hal yang terjadi setiap tahunnya di Kota Langsa. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam penanganan bencana karena masyarakat dapat menjadi pihak pertama yang terkena dampak dan juga pihak yang pertama kali memberikan respon terhadap bencana yang mereka hadapi sehingga diperlukan upaya membangun kapabilitas masyarakat itu sendiri untuk mencegah dan menanggulangi bencana.

5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;

Upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus dilakukan baik melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat serta optimalisasi sumber-sumber daya potensial ekonomi daerah. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan-kawasan wisata perlu dikembangkan pusat pusat pengembangan ekonomi baru dan juga pusat-pusat perdagangan. Saat ini Pemerintah Kota Langsa mencoba menjadikan sektor wisata sebagai sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi selain sektor perdagangan dan jasa. Kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah kunjungan wisatawan yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya, jumlah wisatawan di tahun 2024 sebanyak 290.362 pengunjung, data ini diambil dari rencana aksi Reformasi Birokrasi Kota Langsa Tahun 2024. Sektor wisata juga dianggap mampu untuk mendorong sektor-sektor lain untuk tumbuh dengan cepat. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Langsa terus berupaya meningkatkan daya tarik objek objek wisata alam maupun objek

wisata buatan melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepariwisataan.

Tersedianya lapangan kerja merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan ekonomi. Jika ketersediaan kesempatan kerja tidak seimbang dengan peningkatan penduduk usia kerja maka akan menimbulkan permasalahan yang disebut pengangguran. Ketika pengangguran tidak dikelola secara baik akan menjadi beban masyarakat. Upaya peningkatan kesempatan kerja tidak terlepas dari kemampuan lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja, seperti kegiatan investasi penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun modal asing. Di Kota Langsa, hingga tahun 2024 terdapat 4.109 investor berskala nasional dengan jumlah tenaga kerja yang terserap 3 orang per pemodal/investor.

Isu strategis lain terkait dengan kesejahteraan adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kota Langsa adalah sebesar 10,33 persen, angka ini lebih tinggi dari angka nasional yang berada pada level 8,57 persen namun masih jauh dengan Aceh yang mencapai angka 12,64 persen. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang kompleks dan multidimensi sehingga untuk mengatasinya diperlukan upaya kolektif dari pemerintah dan masyarakat dalam menyusun dan menerapkan strategi yang komprehensif, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Ketersediaan pangan berkelanjutan merupakan hal penting yang harus tetap dipenuhi meskipun kondisi dan situasi daerah yang sulit sekalipun. Untuk itu, Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menjaga ketahanan pangan melalui berbagai strategi seperti mendorong pemanfaatan lahan dan mencegah alih fungsi lahan produktif.

Tanaman padi sebagai sumber pangan utama penduduk Kota Langsa masih tetap diupayakan untuk dibudidaya di lahan pertanian. Hingga tahun 2024, luas area panen padi mencapai 1.985 ha dengan produktivitas padi mencapai 5,1 ton/ha. Memenuhi kekurangan kebutuhan pangan, Kota Langsa dapat memperolehnya dari wilayah lain.

Sebagai sektor unggulan daerah, sektor perdagangan dan jasa memiliki peran penting dalam memajukan daerah. Pada Tahun 2024 sektor perdagangan dan jasa memiliki kontribusi yang paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang mencapai 29,60 persen sehingga sangat potensial untuk terus dikembangkan. Disisi lain Kota Langsa yang relatif dekat dengan perbatasan wilayah Sumatera Utara yang berpeluang besar untuk kemitraan lintas daerah dalam menjalin transaksi perdagangan dan jasa

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Pemukiman Penduduk yang Berkualitas;

Ketersediaan infrastruktur wajib dipenuhi seiring pertumbuhan ekonomi karena merupakan salah satu elemen krusial dalam mengurai masalah logistik. Salah satu infrastruktur yang terpenting pada suatu lokasi adalah memiliki jaringan jalan yang terhubung dengan kondisi baik. Sejalan dengan semakin banyaknya penduduk berkendara, maka intensitas lalu lintas jalan juga semakin tinggi. Panjang jalan Kota Langsa keseluruhan mencapai 611,37 km dengan panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 551,6 km dimana proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik baru mencapai 87,38 persen. Infrastruktur jalan yang sudah ada masih membutuhkan peningkatan, perbaikan dan pembangunan baru.

Dalam hal tata ruang dan lingkungan hidup, keberadaan ruang yang tertata bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Di tahun 2024 Tingkat ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kota Langsa yang mencapai 98,38 persen perlu terus ditingkatkan. Ketidaksesuaian penggunaan tata ruang seperti tidak optimalnya penggunaan tanah, timbulnya berbagai masalah lalu lintas, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan utilitas, timbulnya masalah pencemaran lingkungan dan sebagainya merupakan tantangan permasalahan yang harus ditanggulangi.

7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;

Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan melalui semangat reformasi birokrasi terus digaungkan mulai dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah terkecil di tingkat gampong/desa. Kebijakan peningkatan kualitas birokrasi saat ini diarahkan pada 3 (tiga) agenda utama, yakni peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pemberdayaan aparatur. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat dalam melayani, dan tepat dalam mengambil keputusan. Penyederhanaan birokrasi telah dimulai perampingan kelembagaan dan pemangkasan struktur organisasi pada pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya pemerintah melakukan pemantapan digitalisasi sistem kerja untuk memangkas hierarki yang berbelit serta penggunaan satu data yang terintegrasi. Untuk itu perlu diikuti dan diperkuat dengan peningkatan kualitas kepemimpinan dan SDM aparatur.

- **PENGHARGAAN YANG DIRAIH OLEH PEMERINTAH KOTA LANGSA**

1. Pemerintah kota Langsa menerima penghargaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).



2. Pemerintah Kota Langsa Menerima Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM Award) Tahun 2024 Sebagai Kabupaten/Kota STBM Pratama pada.



3. Penghargaan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Award Tahun 2024 Terbaik 3 Tingkat Nasional Kategori Kabupaten/Kota.



4. Pj. Walikota Langsa, Pemerintah Kota Langsa Menerima Penghargaan UHC (Universal Health Coverage) Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Tahun 2024.



5. Penghargaan Anugerah Lingkungan Hidup Tahun 2024 (PROPER, Adiwiyata, Adipura, Kalpataru dan IKPLHD) Tahun 2023/2024



6. Penyerahan Piagam Penghargaan Dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Kepada Pj. Walikota Langsa, Syaridin, S. Pd, M. Pd Atas Penghargaan Dari Kementerian Keuangan RI Terhadap Keberhasilan Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat ; Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Penurunan Stunting dan Percepatan Belanja Daerah Tahun 2024).



7. Penghargaan Gampong Cinta Raja Kecamatan Langsa Timur Atas Penghargaan Juara 7 Besar Kategori Desa Berkembang Dari 3331 Desa Se-Nusantara Dalam Ajang Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2024 Dan Penganugerahan Lencana Bakti Pembangunan Desa Kepada Pj. Walikota Langsa Dari Menteri Desa



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RPD KOTA LANGSA 2023-2026

Dalam rangka mewujudkan sinergisitas pelaksanaan pembangunan, sinkronisasi antara dokumen perencanaan yang bersifat tahunan berupa Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) mutlak diperlukan.

Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 diintruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2023-2026. Adapun terkait dengan penyusunan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud oleh Intruksi Menteri Dalam Negeri tersebut memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Tahun 2017-2022, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi 2023-2026, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Komponen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2023-2026 terdiri dari:

a. Visi

Visi RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Langsa sebagai Daerah Perdagangan dan Industri, disertai Masyarakat yang Maju dan Islami”.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan perekonomian daerah ;
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
3. Mewujudkan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan serta birokrasi yang bersih;
4. Melaksanakan syariat islam secara kaffah dan melestarikan adat dan budaya daerah.

c. Tujuan

1. Implementasi syariat islam serta lestarnya adat dan budaya;
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur dan potensi daerah;
3. Meningkatnya mutu pendidikan daerah;
4. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
5. Terjaganya perdamaian serta meningkatnya kewaspadaan, keamanan dan ketertiban umum;
6. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah;
7. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga;
8. Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup;
9. Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak serta keluarga berencana.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan
Misi 1 :	
Optimalisasi Sumber Daya untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Menurunnya Angka Kemiskinan melalui peningkatan Infrastruktur dan Potensi Daerah
Misi 2 :	
Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Mutu Pendidikan Daerah 2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Misi 3 :	
Mewujudkan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan serta Birokrasi yang Bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2. Terjaganya Perdamaian serta Meningkatkan Kewaspadaan, Keamanan dan Ketertiban Umum 3. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana 4. Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olahraga
Misi 4 :	
Melaksanakan Syariat Islam secara Kaffah dan Melestarikan Adat dan Budaya Daerah	Implementasi Syariat Islam serta Lestarinya Adat dan Budaya

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pemerintah Kota Langsa pada Tahun 2024 telah menetapkan dan merevisi perjanjian kinerja sesuai RPD dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Langsa. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Langsa dijabarkan pada tabel dibawah ini:

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai Islami	- Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	67
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Peserta Didik	- Indeks Pendidikan	Indeks	0,82
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	- Usia Harapan Hidup	Tahun	69,71
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	- Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Rasio	0,82
5	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	- Pertumbuhan PDRB	Persen	4,38
		- Tingkat Kemiskinan	Persen	9
6	Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,50

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	Predikat	B
		Maturitas SPIP	Level	3
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah	- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP
9	Meningkatnya Kemandirian Desa	- Indeks Desa Membangun	Indeks	0,724

Berdasarkan tabel Perjanjian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran strategis dan indikator kinerja telah menjelaskan seluruh visi dan misi Kota Langsa secara lebih rinci. Perjanjian Kinerja menggambarkan target kinerja yang akan diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Rincian Jumlah Anggaran Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan	946.719.683.512,00
	- PAD	185.362.524.536,00
	- Pendapatan Trasfer	761.357.158.976,00
	- Lain-lain pendapatan Daerah yang sah	-
2	Belanja	974.473.003.074,36
	- Belanja Operasi	771.427.528.180,36
	- Belanja Modal	93.894.751.901,00
	- Belanja Tidak Terduga	127.438.893,00
	- Belanja Transfer	109.023.284.100,00
3	Pembiayaan	27.753.319.562,36
	- Penerimaan Pembiayaan	28.187.319.562,36
	- Pengeluaran Pembiayaan	434.000.000,00

Alokasi APBK Langsa tahun 2024 meliputi Pendapatan sebesar Rp. 946.719.683.512,00 Belanja sebesar Rp. 974.473.003.074,36 dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 27.753.319.562,36. Pendapatan daerah terdiri dari PAD sebesar Rp. 185.362.524.536,00, pendapatan transfer sebesar Rp. 761.357.158.976,00. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 771.427.528.180,36, belanja modal sebesar Rp. 93.894.751.901,00, belanja tidak terduga sebesar Rp. 127.438.893,00 dan belanja transfer sebesar Rp. 109.023.284.100,00. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 28.187.319.562,36 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 434.000.000,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu cara bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi pemerintah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun pada awal tahun.

Oleh sebab itu, pada bab ini akan menguraikan tentang perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Kota Langsa dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Langsa Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Pencapaian kinerja pemerintah Kota Langsa dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisis hasil pengukuran pencapaian setiap sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024.

METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai dalam mewujudkan organisasi yang akuntabel.

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Langsa. Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa terdiri dari :

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian yang semakin baik (**Progres Positif**) dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah tingkat capaian (**Progres Negatif**), maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{(\text{Target}) - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	> 100%	Sangat Baik (A)
2.	> 76% s/d 100%	Baik (B)
3.	> 55% s/d 75%	Cukup (C)
4.	< 55%	Kurang (D)

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA LANGSA

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kota Langsa untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan dilakukan analisis capaian kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target kinerja tahun ini, perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, perbandingan target jangka menengah, serta standar nasional, penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN IKU PEMKO LANGSA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai Islami	- Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	67	67	100
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Peserta Didik	- Indeks Pendidikan	Indeks	0,82	0,82	100
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	- Usia Harapan Hidup	Tahun	69,71	67,95	97,47
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	- Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Rasio	0,82	0,87	106
5	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	- Pertumbuhan PDRB	Persen	4,38	4,41	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
5	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	- Tingkat Kemiskinan	Persen	9	10,33	85,22
6	Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,50	68,94	95
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	60,00	61,45	102,42
		Maturitas SPIP	Level	3	3	100
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah	- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	belum diterbitkan oleh BPK	-
9	Meningkatnya Kemandirian Desa	- Indeks Desa Membangun	Indeks	0,724	0,724	100

Analisis capaian kinerja pada setiap sasaran strategis Pemerintah Kota Langsa tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Misi 1

“Melaksanakan Syariat Islam Secara Kaffah dan Melestarikan Adat dan Budaya Daerah”

Tabel 3.2
Perbandingan Target terhadap Realisasi

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai Islam	Indeks Pembangunan Syariat Islam	67	67

Sumber : Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja “ Indeks Pembangunan Syariat Islam” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di tahun 2024 tergolong **Baik** dengan persentase sebesar 100 persen.

Tabel 3.3
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

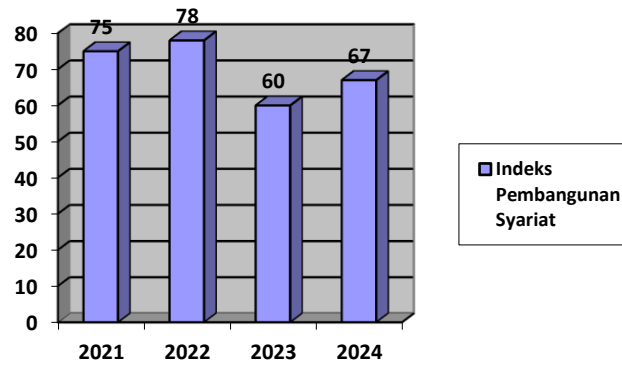
No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target PK	Realisasi	Capaian	Target PK	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	60	60	100	67	67	100

Sumber : Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir RPD

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target Akhir RPD
1.	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	60	60	67	67	69	71

Sumber : Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa



Sumber : RKPD Kota Langsa Tahun 2024

Untuk mengukur Indeks Pembangunan Syariah Islam di hitung sebagai rata-rata geometrik dari 7 (tujuh) dimensi yang terdiri dari:

No	Dimensi Indeks Pembangunan Syariah Islam	Indikator Indeks Pembangunan Syariah Islam	Nilai Indeks Pembangunan Syariah Islam
1.	Aqidah	Rukun Iman	72
		Dalil Al qur'an dan Hadist	72
		Ahlussunnah wal jamaah	72
		Pengingkaran rukun iman dan Islam	60
		Paham ajaran sesat yang difatwakan MPU	60
2.	Lembaga Keuangan Syariah	Penerapan Qanun LKS	60
		Penutupan Operasional Lembaga Keuangan	60
		LKS Mampu Menghambat Rentenir dan Praktik Riba	60
		LKS Telah Terbebas dari unsur Riba,Gharar,Masyir	60
3.	Kepatuhan Membayar Zakat di Baitul Mal Aceh	Perhitungan pendapatan dan Nishab Zakat	70
		Pembayaran zakat di Baitul Mal Kota Langsa	70
4.	Melek Al-Quran	Kemampuan baca Al-Quran	75
		Rutinitas Membaca Al-Quran	75
5.	Manajemen Mesjid	Aktivitas Shalat di Masjid	75
		Pelayanan Masjid	75

No	Dimensi Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indikator Indeks Pembangunan Syariat Islam	Nilai Indeks Pembangunan Syariat Islam
		Fasilitas Masjid	75
		Masjid Kategori BEREH	75
6.	Hukum Jinayat	Penegakan Hukum Jinayat	65
		Praktik Hukum Cambuk	65
7.	Akhlak	Tidak Mengambil Sesuatu yang bukan hak	70
		Saling Menghormati dan Menyanyangi	70
		Kepedulian Sosial	60
		Penggunaan HP/Teknologi secara bermanfaat	60
		Praktik Razia Pakaian	65
		Mode Busana Islami	65

Upaya penerapan Indeks Pembangunan Syariat Islam yang terus ditingkatkan Pemerintah Kota Langsa, antara lain dengan melakukan sosialisasi pemahaman akhlaq di tengah-tengah masyarakat guna memperbaiki akhlak masyarakat Kota Langsa untuk mendekatkan diri kepada ALLAH SWT semata.

➤ **Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**

- Pembinaan dan penyuluhan terhadap qanun terkait pelanggaran Syari’at Islam;
- Meningkatkan aqidah, akhlak, melek Al-Qur’an, manajemen masjid dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan syariat islam;
- Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dakwah dan majelis taklim;
- Pelaksanaan sosialisasi tentang pelaksanaan penerapan syariat islam kepada mahasiswa di Universitas dan disekolah;
- Pelaksanaan sosialisasi tentang pelaksanaan penerapan syariat islam kepada santri – santri dilembaga pendidikan dayah;
- Dukungan aktif lembaga - lembaga pendidikan dayah terhadap pelaksanaan syiar islam melalui keikutsertaan dalam penyebaran informasi keislaman.
- penegakan Syariat Islam kepada santri-santri dilembaga pendidikan dayah.

Misi 2

“Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas”

Tabel 3.5
Perbandingan Target terhadap Realisasi

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Peserta Didik	Indeks Pendidikan	0,82	0,82

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

Pada tahun 2024 reliasasi Indeks Pendidikan di Kota Langsa mencapai 0,82. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja Indeks Pendidikan dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di tahun 2024 tergolong **Baik** dengan persentase capaian sebesar 100 persen.

Tabel 3.6
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

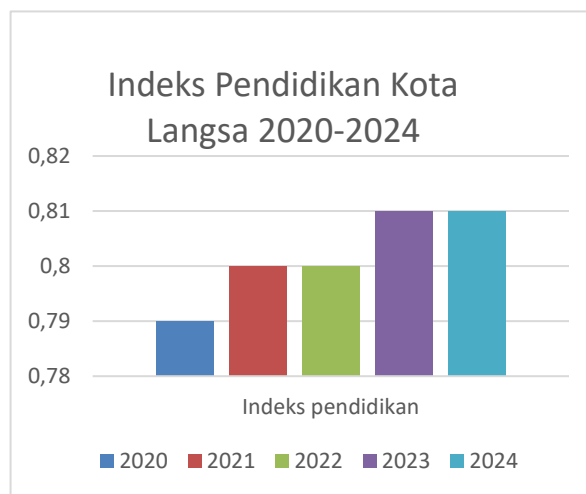
No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target PK	Realisasi	Capaian	Target PK	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pendidikan	Indeks	-	0,81	-	0,82	0,82	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

Tabel 3.7
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir RPD

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target Akhir RPD
1.	Indeks Pendidikan	Indeks	-	0,81	0,82	0,82	0,82	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa



Sumber : RKPD Kota Langsa Tahun 2025

- **Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**
 - Kualitas guru yang dapat menyampaikan materi dengan efektif dan memotivasi siswa untuk belajar
 - Kualitas lingkungan belajar yang baik dapat mendukung proses belajar mengajar
 - Partisipasi orang tua dalam Pendidikan yang dapat mendukung proses belajar anak dan memantau kemajuan anak
- **Hambatan dan masalah sasaran ini :**
 - Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri
 - Keterbatasan akses Pendidikan terutama di daerah terpencil

- Kultur dan tradisi yang tidak mendukung nilai nilai Pendidikan dan dapat menghambat proses belajar mengajar
- **Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini :**
- Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan professional
 - Mengembangkan kurikulum yang relevan dan efektif untuk meningkatkan kualitas Pendidikan
 - Mengembangkan system informasi Pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pendidikan
 - Mengembangkan Kerjasama dengan orang tua untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan

Tabel 3.8
Perbandingan Target terhadap Realisasi

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	69,71	67,95

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja “Usia Harapan Hidup” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di tahun 2024 tergolong **Baik** dengan persentase capaian sebesar 97,47 persen.

Tabel 3.9
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

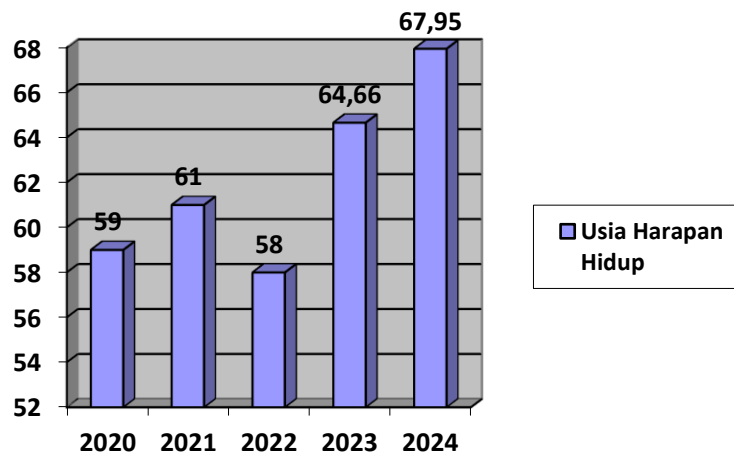
No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target PK	Realisasi	Capaian	Target PK	Realisasi	Capaian
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,62	64,66	92,87	69,71	67,95	97,47

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa

Tabel 3.10
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir RPD

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target Akhir RPD
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,62	64,66	69,71	67,95	69,8	69,89

Sumber : Dinas Kesehatan dan RPD Kota Langsa



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu wilayah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan masyarakat di dalamnya. Selama periode tahun 2017-2021, UHH Kota Langsa terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 UHH Kota Langsa sebesar 58 tahun dan pada tahun 2024 meningkat diangka 67,95 tahun. Tahun 2024 UHH Provinsi Aceh sebesar 73,2 tahun dan Nasional mencapai 72,39 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian UHH Kota Langsa berada di bawah Provinsi Aceh dan Nasional.

Peningkatan UHH menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan UHH Kota Langsa tidak lepas dari berbagai kebijakan yang di upayakan oleh Pemerintah Kota Langsa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar, dimulai dari penyediaan infrastruktur, sarana prasarana maupun tenaga kesehatan serta kualitas layanan.

Indikator ini diperhitungkan dari Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Pada tahun 2024 capaian Usia Harapan Hidup di Kota Langsa mencapai 67,95 tahun.

➤ **Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**

- Menurunnya morbiditas atau angka kesakitan.
- Meningkatnya status gizi dan anak balita.
- Menurunnya kasus gizi buruk dan stunting.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memantau kesehatannya secara rutin di Fasyankes.
- Makin mudahnya mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
- Makin mudahnya masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang kesehatan.

➤ **Hambatan dan masalah sasaran ini :**

- Kurangnya kaderisasi masyarakat untuk deteksi dini penyakit menular dan tidak menular.
- Masih kurangnya kepedulian sebagian masyarakat dan *stakeholder* dalam mendukung pencegahan permasalahan Kesehatan;
- Masih kurangnya peran serta dan keterlibatan *stakeholder* dalam pemecahan permasalahan kesehatan.

➤ **Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini :**

- *Home visit* kerumah sasaran usia lanjut dan balita;
- Sosialisasi *mobile* tentang penyakit dan pencegahannya;
- Promosi germas dan perilaku hidup bersih sehat;
- Pelaksanaan kegiatan PIS-PK yang berkesinambungan.

Misi 3

“Mewujudkan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan serta Birokrasi yang Bersih”

Tabel 3.11
Perbandingan Target terhadap Realisasi

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,82	0,87

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja “Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di tahun 2024 tergolong Baik dengan persentase capaian sebesar 106 persen.

Tabel 3.12
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Rasio	0,81	0,81	100	0,82	0,87	106

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa

Tabel 3.13
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir RPD

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
			Target PK	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target Akhir RPD
1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Rasio	0,81	0,81	0,82	0,87	0,83	0,84

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa

Pembangunan infrastruktur jalan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah, terutama untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan arus distribusi barang dan jasa dalam mendukung perekonomian. Panjang jalan Kota Langsa keseluruhan mencapai 611,37 Km, dari panjang jalan tersebut sebagian besar berada dalam kondisi baik. Hal ini dapat ditunjukkan melalui rasio panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 0,87 atau sebesar 87,38% dari panjang jalan keseluruhan.

Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2024 jumlah Panjang jalan kabupaten/kota di Kota Langsa mencapai 611,37 km. Sedangkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 534,22 km. Sejalan dengan semakin banyaknya penduduk berkendara, maka intensitas lalu lintas akan jalan juga semakin tinggi. Demikian pula dengan kemampuan kendaraan melaju di jalan dalam wilayah Kota Langsa dengan kecepatan km/jam yang diinginkan, untuk mengetahui jalan Kota Langsa dalam kondisi baik (>40 Km/jam) dan panjang jalan yang memiliki trotoar dan *drainase*/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m).

Indikator ini diperhitungkan dari panjang jalan kondisi baik yang terhubung dibagi jumlah panjang jalan seluruhnya.

➤ **Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**

- Pelaksanaan yang sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- Pengawasan yang maksimal.
- Komitmen semua pihak yang terlibat dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan.

➤ **Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini :**

- Mempercepat pelaksanaan pelelangan kegiatan, tidak berpatokan hanya pada satu penyedia material.
- Dukungan ketersediaan alat berat.
- Memaksimalkan pekerjaan pada saat kondisi cuaca baik.

Tabel 3.14
Perbandingan Target terhadap Realisasi

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	4,38	4,41
		Tingkat Kemiskinan	9	10,33

Sumber : Disperindag dan Dinas Sosial Kota Langsa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja “Pertumbuhan PDRB” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di tahun 2024 tergolong **Baik** dengan persentase capaian sebesar **100** persen. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja “Tingkat kemiskinan” juga disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di tahun 2024 tergolong **Baik** dengan persentase capaian sebesar **85,22** persen.

Tabel 3.15
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan PDRB	Persen	4,34	4,53	104	4,38	4,41	100
2.	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,5	10,53	89,15	9	10,33	85,22

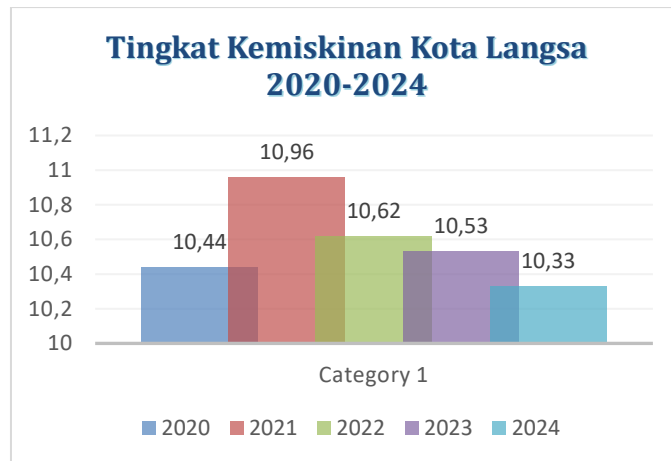
Sumber : Disperindag dan Dinas Sosial Kota Langsa

Tabel 3.16
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir RPD

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target Akhir RPD
1.	Pertumbuhan PDRB	Persen	4,34	4,53	4,38	4,41	4,6	4,53

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target Akhir RPD
2.	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,5	10,53	9	10,33	9	8,5

Sumber : Disperindag dan Dinas Sosial Kota Langsa



Sumber : RKPD Kota Langsa tahun 2024



Sumber : RKPD Kota Langsa tahun 2024 dan LKJIP Kota Langsa 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Langsa yang ditinjau dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) masih berada di bawah 5%. Capaian tertinggi pertumbuhan ekonomi Kota Langsa selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 4,78% sedangkan capaian terendah sebesar -1,12% terjadi pada tahun 2020 yang diindikasikan sebagai dampak negatif dari pandemi Covid-19.

Kontribusi potensi pembentuk PDRB Kota Langsa yang berasal dari sumber daya Pemerintah Daerah dan swasta/masyarakat cenderung stabil dan kurang adanya kontribusi yang sangat signifikan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Langsa. Masih rendahnya upaya peningkatan realisasi pendapatan daerah, jumlah investor asing yang masih sedikit, dan adanya penyelesaian isu-isu pembangunan yang harus disegerakan ikut mempengaruhi situasi perekonomian nasional dan internasional dan menjadikan capaian pertumbuhan ekonomi Kota Langsa berada di bawah angka 5%.

Indikator ini diperhitungkan dari $PDRB = \text{konsumsi} + \text{investasi} + \text{pengeluaran pemerintah} + (\text{ekspor} - \text{impor})$ dimana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.

➤ **Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**

a. Faktor Internal

- Kualitas SDM , Penguasaan organisasi, struktur organisasi dan sistem manajemen yang baik
- Kultur/ budaya bisnis yang kompeten
- Kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar

b. Faktor Eksternal

- Sistem budaya masyarakat yang akulturasi
- Kondisi infrastruktur yang baik
- Tingkat pendidikan masyarakat
- Lingkungan global

➤ **Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini :**

- Dukungan anggaran dalam melakukan penjangkaran produk kreatif dan pelatihan IKM

- Melakukan design produk yang lebih menarik dan finishing yang lebih sempurna
- Mengupayakan penyediaan bahan pokok alternatif
- Pengadaan alat tera yang mumpuni dan alokasi SDM metrologi

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Menurut BPS, Garis kemiskinan (GK) atau batas kemiskinan adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Langsa, garis kemiskinan di Kota Langsa tahun 2021 sebesar Rp.435.438 /kapita/bulan.

Jumlah Penduduk kemiskinan di Kota Langsa pada rentang waktu 2014-2023 dapat dikatakan menurun, dimana pada rentang waktu 5 (lima) tahun tersebut persentase penduduk miskin kota Langsa turun sebesar 0,11%, dengan tingkat kemiskinan menjadi 10,33% pada tahun 2024. Perlambatan penurunan atau kenaikan tingkat kemiskinan terjadi pada tahun 2020 dimana pada rentang waktu tersebut terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat dan berdampak pada menurunnya pendapatan penduduk. Hal ini telah menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan menjadi terganggu.

➤ **Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**

- Meningkatnya pendapatan penduduk perkapita;
- Meningkatnya Lapangan Pekerjaan.

➤ **Hambatan dan masalah sasaran ini :**

- Dinamika munculnya warga miskin baru (pandemi dan kehilangan pekerjaan);
- Ketidaksesuaian penerima manfaat layanan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan baik data terpadu dan data intervensi lokal.

➤ **Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini :**

- Tersedianya data yang terpilah berdasarkan kebutuhan dasar warga miskin sesuai jenis layanan program masing-masing perangkat daerah;

- Menetapkan data penerima manfaat yang dimutakhirkan untuk intervensi program dan kegiatan untuk masyarakat miskin.

Tabel 3.17
Perbandingan Target terhadap Realisasi

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,50	68,94

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Pada tahun 2024 capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Langsa tergolong **Baik** dengan persentase capaian sebesar **95** persen. Target Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 menurun sebesar 5,3% dikarenakan target di tahun 2023 tidak tercapai

Tabel 3.18
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

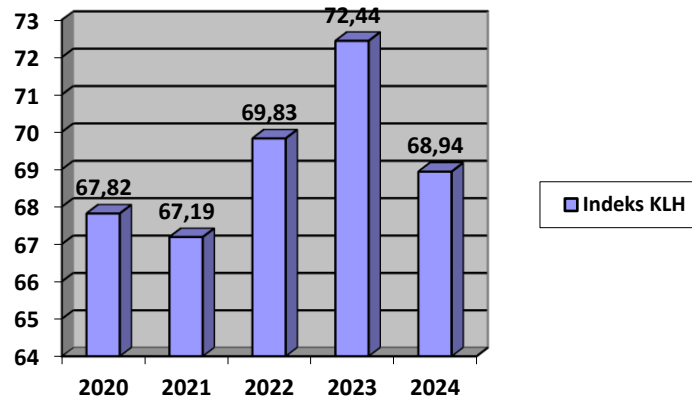
No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	77,8	72,44	107	72,50	68,94	95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Tabel 3.19
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir RPD

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target Akhir RPD
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	77,8	72,44	72,50	68,94	72,60	69,5

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan RKPD Kota Langsa Tahun 2025

Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah, oleh karena itu kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting. Indikator ini diperhitungkan dari IKLH Kota Langsa Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Indeks kualitas Air dengan nilai 60,00 %
2. Indeks Kualitas Udara dengan nilai 89,99 %
3. Indeks kualitas tutupan Lahan dengan nilai 45,36 %

Persentase perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut :
 $(37\% \times IKA) + (41\% \times IKU) + (22\% \times IKTL)$.

➤ **Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**

- Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan;
- Adanya koordinasi lintas sektor;
- Melakukan perawatan dan penanaman pohon di areal RTH

➤ **Hambatan dan masalah sasaran ini :**

- Pergeseran pertumbuhan ekonomi ke sektor jasa
- Limbah industri yang kurang terawasi
- Kurangnya penghijauan
- Luas dan kualitas tutupan lahan dan RTH
- Kesadaran masyarakat dalam menjaga RTH masih minim.

➤ **Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini :**

- Perlu adanya kebijakan dan peraturan dalam implementasi kegiatan yang mendukung pengendalian kerusakan lahan.
- Perlu meningkatkan upaya perambahan luas dan kualitas RTH.
- Perlu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang bergerak dalam bidang lingkungan.

Misi 4

“Mewujudkan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan serta Birokrasi yang Bersih”

Tabel 3.20
Perbandingan Target terhadap Realisasi

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	60,00	61,45
		Maturitas SPIP	3	3

Sumber : : Sekretariat Daerah Kota Langsa dan Inspektorat Kota Langsa

Pada tahun 2024 capaian Nilai SAKIP Pemerintah Daerah di Kota Langsa tergolong **Baik** dengan persentase capaian sebesar **102,45** persen. Penilaian akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Langsa di tahun 2024 memperoleh predikat B dengan nilai 61,45.

Untuk indikator kinerja “Maturitas SPIP” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di tahun 2024 Level SPIP Kota Langsa berada pada level III dengan kategori **Baik** dan capaian **100** persen.

Tabel 3.21
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

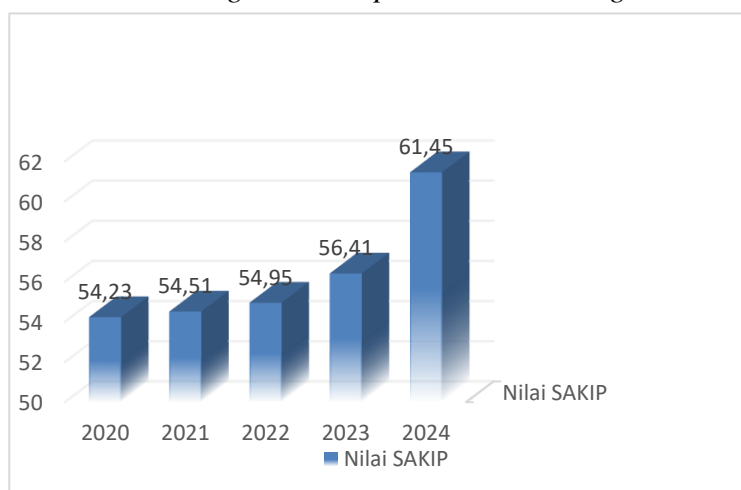
No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	60	56,41	94	60,00	61,45	102,42
2.	Maturitas SPIP	Level	3	3	100	3	3	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Langsa dan Inspektorat Kota Langsa

Tabel 3.22
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir RPD

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target Akhir RPD
1.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	60	56,41	60,00	61,45	64,00	64,00
2.	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Langsa dan Inspektorat Kota Langsa



Grafik Nilai SAKIP Kota Langsa Tahun 2020-2024

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Pengertian Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah.

LKJIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD/APBK. Penyusunan LKJIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun.

Menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi nilai SAKIP Kota Langsa melakukan upaya perbaikan diantaranya:

- a. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen *cascading* kinerja level Pemda maupun SKPK untuk memastikan kualitas *cascading* (perjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan *logical framework* dan *critical succes factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.;
- b. Memaksimalkan penggunaan aplikasi e-kin.langsakota.go.id untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala (bulanan/ triwulanan) dan sistematis, serta mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja.
- c. Meningkatkan pemahaman pimpinan dan SDM perencana, pengelola serta evaluator internal terkait sistem akuntabilitas kinerja dan penjabaran (*cascading*) kinerja untuk meningkatkan implementasi manajemen kinerja instansi pemerintah;
- d. Menetapkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa dengan pemberian berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja;

- e. Menyampaikan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kota Langsa maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui website ppid.langsakota.go.id dan esr.menpan.go.id sebagai bentuk pertanggungjawaban publik;
 - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada OPD terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.
 - g. Menyusun Peraturan Walikota No 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sakip di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
- **Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**
- Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.
 - Dukungan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dalam memberikan data dukung.
 - Komitmen pimpinan dalam perencanaan dan pengimplementasian SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa dan Perangkat Daerah.
- **Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini :**
- Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah.
 - Melakukan pendampingan baik dalam memberikan pemahaman tentang penyusunan dan pelaksanaan Sakip maupun tentang sistem manajemen akuntabilitas kepada pejabat yang membidangi dan pimpinan organisasi perangkat daerah.

Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja “Maturitas SPIP” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di tahun 2024 Level SPIP Kota Langsa berada pada level III dengan kategori “BAIK” dan capaian 100 persen.

➤ **Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**

- Komitmen Pimpinan untuk menerapkan SPIP
- Peningkatan kapasitas SDM dalam pengendalian internal
- Adanya pedoman dan regulasi yang mendukung implementasi SPIP

➤ **Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini :**

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pimpinan terkait pentingnya SPIP
- Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang SPIP kepada ASN
- Meningkatkan peran APIP dalam implementasi SPIP

Tabel 3.23
Perbandingan Target terhadap Realisasi

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	Belum diterbitkan oleh BPK

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Tabel 3.24
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	Belum diterbitkan oleh BPK	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Tabel 3.25

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir RPD

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target Akhir RPD
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Belum diterbitkan oleh BPK	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukanlah suatu prestasi, namun merupakan kewajiban yang harus dilakukan seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan Anggaran.

Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa (auditor eksternal) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disajikan dalam lingkungan pengendalian intern yang memadai. Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI merupakan tolak ukur indikator untuk menilai akuntabilitas entitas Pemerintah Kota Langsa. Predikat Opini WTP belum dapat diketahui dikarenakan BPK RI dalam mengaudit laporan keuangan memerlukan waktu yang relatif lama yaitu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Namun demikian Pemerintah Kota Langsa melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2024 menargetkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

➤ **Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**

- Pengelolaan penatausahaan keuangan yang profesional dan akuntabel.
- Pengungkapan yang cukup terhadap laporan keuangan.

- Penyampaian laporan keuangan tepat waktu ke BPK-RI dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- **Hambatan dan masalah sasaran ini :**
- Dalam penggunaan aplikasi SIPD sebagai sistem penatausahaan masih banyak terdapat permasalahan dan kendala yang bersifat sistematis, sehingga menghambat penyerapan realisasi anggaran.
 - Keterbatasan SDM yang mampu menyusun laporan keuangan sebagai pelaksanaan pertanggungjawaban APBK.
 - Aplikasi yang support untuk menghasilkan output pelaksanaan pertanggungjawaban APBK.
 - Regulasi yang berubah-ubah perlu adanya penyesuaian dalam pertanggungjawaban APBK.
- **Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini :**
- Mengupayakan sistem penatausahaan dengan aplikasi lain yang berfungsi sebagai pendampingan aplikasi SIPD.
 - Pembekalan SDM sesuai dengan perkembangan regulasi baru.
 - Menggunakan aplikasi yang dapat mensupport output pelaksanaan pertanggungjawaban APBK.

Tabel 3.26
Perbandingan Target terhadap Realisasi

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,724	0,724

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja “Indeks desa membangun” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di tahun 2024 tergolong **Baik** dengan persentase capaian **100** persen.

Tabel 3.27
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target PK	Realisasi	Capaian (%)	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Desa Membangun	Indeks	-	0,7184	-	0,724	0,724	100

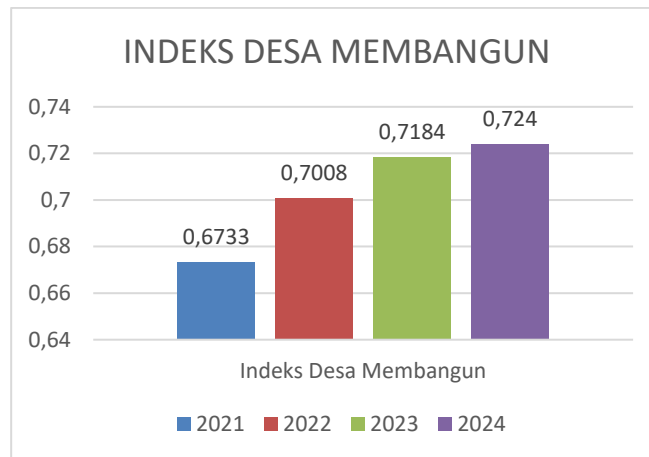
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa

Tabel 3.28
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir RPD

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target Akhir RPD
1.	Indeks Desa Membangun	Indeks	-	0,7184	0,724	0,724	0,7300	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa

Berdasarkan **tabel 3.27** dan **tabel 3.28**, bahwa untuk indikator Indeks Desa Membangun merupakan indikator yang ditambahkan pada Perjanjian Kinerja Kota Langsa Tahun 2024, sehingga target tahun 2023 tidak terdapat di dalam dokumen perencanaan baik Perjanjian Kinerja Kota Langsa maupun Rencana Pembangunan Daerah Kota Langsa. Oleh karena itu indikator Indeks Desa Membangun tahun 2023 tidak dapat dihitung capaiannya dan tidak ada target akhir di dokumen RPD.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa dan RKPD Kota Langsa 2025

Sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2022 tujuan utama dari Indeks Desa Membangun (IDM) adalah untuk memberikan gambaran holistik tentang kondisi desa dan memungkinkan pemetaan serta pemantauan kemajuan desa dalam berbagai aspek dari waktu ke waktu, dengan IDM Pemerintah, organisasi, dan lembaga pembangunan dapat memahami dan menganalisis kebutuhan spesifik di setiap desa.

Perkembangan capaian IDM Kota Langsa mendapat capaian pada level kategori berkembang, pada tahun 2022 juga masih kategori berkembang dan pada tahun 2023 sudah mengalami peningkatan status dari berkembang menjadi kategori maju.

Pada tahun 2020 dalam pengukuran status desa di Kota Langsa terdapat klasifikasi status desa tertinggal sebanyak 1 desa, status desa berkembang sebanyak 50 desa dan status desa maju sebanyak 15 desa kemudian pada tahun 2021 jumlah desa maju meningkat menjadi 17 desa, desa berkembang menurun menjadi 48 desa dan desa tertinggal sebanyak 1 desa. Pada tahun 2022 terdapat 10 desa di Kota Langsa yang sudah berstatus mandiri, 14 desa berstatus maju, 41 Desa berstatus berkembang dan 1 desa yang masih berstatus tertinggal. Tahun 2023 jumlah desa mandiri meningkat menjadi 12 desa, desa maju 14 desa, desa berkembang 39 desa serta desa tertinggal berjumlah 1 desa dan pada tahun 2024 jumlah desa mandiri meningkat menjadi 14 desa, desa maju 25 desa, desa berkembang menurun menjadi 26 desa serta desa tertinggal berjumlah 1 desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja “Indeks desa membangun” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di tahun 2024 tergolong *Baik dengan persentase capaian 100 persen*.

➤ **Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**

- Tercapainya nilai indeks ketahanan sosial (IKS) berupa layanan dasar dan sosial
- Tercapainya nilai indeks ketahanan ekonomi (IKE) berupa produksi desa dan fasilitas pendukung ekonomi
- Tercapainya nilai indeks ketahanan lingkungan (IKL) berupa kualitas lingkungan, kerawanan bencana dan tangap bencana

➤ **Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini :**

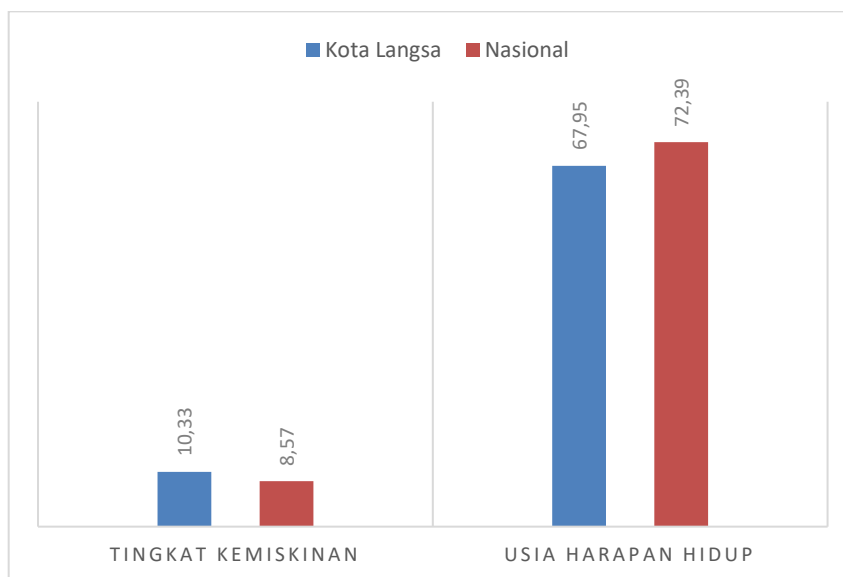
- Melakukan evaluasi untuk perbaikan target capaian sasaran pada tahun berikutnya, berdasarkan penilaian dari masing-masing indikator
- Menyajikan rekomendasi IDM tahun 2024 untuk mengetahui hal apa saja yang dilakukan di tahun 2025, mulai dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL.

Terdapat tiga Indikator Kinerja Utama Kota Langsa yang dapat disandingkan dengan Capaian Tingkat Nasional yaitu Usia Harapan Hidup dan Tingkat Kemiskinan.

Tabel 3.29
Capaian Indikator Kinerja Pemko Langsa terhadap capaian Nasional Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024 (%)		Capaian Terhadap Capaian Nasional (%)
			Kota Langsa	Nasional	
1.	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,33	8,57	79,46
2.	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,95	72,39	93,86



Grafik Perbandingan Capaian Kota Langsa Terhadap Nasional

B. Realisasi Anggaran

Dalam Rangka Untuk Mencapai Target Kinerja Sebanyak 9 Sasaran Strategis Sebagaimana Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Besaran Alokasi Dan Realisasi Belanja Untuk Setiap Sasaran Strategis Kota Langsa dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan berupa output dari rencana alokasi biaya sebagai salah satu input dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kebijakan anggaran keuangan daerah mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Keberhasilan capaian indikator-indikator telah dianalisa sebelumnya tidak terlepas dari dukungan dana sebagai bagian dari kebijakan anggaran keuangan. Alokasi APBK Langsa tahun 2024 meliputi Pendapatan sebesar Rp. 946.719.683.512,00 Belanja sebesar Rp. 974.473.003.074,36 dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 27.753.319.562,36. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.30
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan	946.719.683.512,00	967.363.632.663,36	102,18
	- PAD	185.362.524.536,00	203.208.720.540,36	109,63
	- Pendapatan Trasfer	761.357.158.976,00	764.154.912.123,00	100,37
	- Lain-lain pendapatan Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	974.473.003.074,36	956.671.064.005,46	98,17
	- Belanja Operasi	771.427.528.180,36	755.200.550.683,54	97,90
	- Belanja Modal	93.894.751.901,00	92.601.015.350,92	98,62
	- Belanja Tidak Terduga	127.438.893,00	0,00	0,00
	- Belanja Transfer	109.023.284.100,00	108.869.497.971,00	99,86
3	Pembiayaan Daerah	27.753.319.562,36	27.753.319.562,36	100,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	- Penerimaan Pembiayaan Daerah	28.187.319.562,36	28.187.319.562,36	100,00
	- Pengeluaran Pembiayaan Daerah	434.000.000,00	434.000.000,00	100,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Adanya Peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan anggaran Rp. 946.719.683.512,00 menjadi Rp. 967.363.632.663,36 dengan realisasi 102,18% dikarenakan bertambahnya objek pajak serta penambahan wajib pajak restoran, hotel dan event yang ada di Kota Langsa.

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan–kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dapat disimpulkan bahwa BAB I dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024 menggambarkan gambaran umum Kota Langsa yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan berdiri tahun 2001, luas wilayah Kota Langsa mencapai 239,83 Km² dan terdiri dari 5(lima) Kecamatan. Kota Langsa merupakan kota jasa yang sedang membangun sektor pariwisata untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada beberapa lokasi wisata di Kota Langsa diantara yaitu Hutan Mangrove, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Hutan Kota, Taman Krueng Langsa, Danau Tasik Biru, Museum Kota Langsa dan juga Kolam renang Vitra Tirta Raya.

BAB II Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024 menjelaskan Perjanjian Kinerja dan Anggaran Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024. Perjanjian Kinerja menggambarkan target kinerja yang akan diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja dalam perjanjian kinerja Walikota Langsa Tahun 2024 yang akan direalisasikan sampai dengan akhir tahun 2024. Adapun alokasi Anggaran Pemerintah Kota Langsa tahun 2024 meliputi Pendapatan sebesar Rp. 946.719.683.512,00 Belanja sebesar

Rp. 974.473.003.074,36 dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 27.753.319.562,36.

Pada BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Langsa telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang BAIK dan signifikan dengan rata-rata capaian sebesar **98,61** atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Anggaran Pemerintah Kota Langsa tahun 2024 terealisasi dengan baik yaitu Pendapatan dengan capaian 102,18% yang terdiri dari capaian anggaran belanja sebesar 98,35% dan pembiayaan daerah sebesar 100%.

Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 masih menemui hambatan dan kendala. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Langsa dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 antara lain :

1. Belum tersedianya *database* yang valid dan akurat pada masing-masing Perangkat Daerah karena belum adanya sistem informasi data yang terintegrasi.
2. Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah sehingga belum semua indikator kinerja didukung dengan kegiatan yang teranggarkan.
3. Dukungan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah masih belum mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya.
4. Belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan oleh keterbatasan di bidang teknis.
5. Belum optimalnya dukungan, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat Kota Langsa dalam pelaksanaan program-program pembangunan
6. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lintas sektor terkait sebagai bahan usulan bagi pengambilan kebijakan.

7. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal karena dukungan regulasi belum terbentuk/belum disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini.

Dalam Upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Langsa tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah:

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkenaan dengan regulasi-regulasi pusat yang terdapat perbedaan-perbedaan dalam penetapan maupun pengaturannya.
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah, untuk memaksimalkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan otonomi daerah, maupun dalam akselerasi implementasi regulasi dan ketentuan pusat sesuai dengan kondisi, karakteristik, potensi dan permasalahan daerah
3. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja Pemerintah Kota Langsa melalui koordinasi internal, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Pemerintah Kota Langsa sebagai contoh dan tauladan bagi Perangkat Daerah.
4. Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Kota Langsa melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan

datang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.